



Edukasi Penerapan Nilai Sila Ke-4 Pancasila dalam Konflik Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Mahasiswa

Artha Uly Sitorus^{1*}, Feby Rosalina Sibagariang², Ica Al Zapirah³, Natasya Octa⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Disubmit: 28 Nov 2025

Diterima: 04 Des 2025

Keywords:

Pancasila,
Sila Ke-4,
Kebijakan Publik,
PBB,
Etika Demokrasi

ABSTRACT

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu aksi protes masyarakat di Kabupaten Pati tahun 2025 menunjukkan lemahnya penerapan etika demokrasi Pancasila dalam kebijakan publik, khususnya nilai Sila Ke-4 tentang permusyawaratan, kebijaksanaan, dan perwakilan. Kegiatan penyuluhan kepada mahasiswa semester satu dilaksanakan untuk memberikan edukasi etika kebijakan publik berbasis nilai Pancasila melalui pendekatan studi kasus, analisis konflik kebijakan, dan simulasi musyawarah. Metode penyuluhan mencakup pemaparan materi teoritis, diskusi terarah, dan roleplay tripartit antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan literasi etis dan pemahaman kritis mahasiswa terhadap hubungan antara proses kebijakan, etika Pancasila, dan potensi konflik sosial. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pelanggaran etika dalam kasus kenaikan PBB serta menyusun rekomendasi penyelesaian berbasis musyawarah, keterbukaan informasi, dan representasi publik. Penyuluhan ini memberikan kontribusi terhadap internalisasi karakter demokratis dan kemampuan mahasiswa sebagai agen moral dalam kehidupan bernegara.

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Artha Uly Sitorus

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: arthauliy.5223240025@mhs.unimed.ac.id

1. Pendahuluan

Kebijakan publik idealnya dibangun atas dasar rasionalitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks negara Indonesia, etika kebijakan publik berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber moral penyelenggaraan negara. Sila Ke-4 “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan pentingnya mekanisme musyawarah, representasi rakyat, dan kebijaksanaan dalam setiap proses pengambilan keputusan publik.

Namun praktik pemerintahan di lapangan tidak selalu selaras dengan nilai dasar tersebut. Contoh konkret muncul pada kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025, ketika masyarakat melakukan aksi protes besar-besaran sebagai bentuk ketidakpuasan atas kebijakan yang dinilai dibuat secara sepihak, tanpa

musyawarah, dan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Kasus ini memunculkan ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat serta menciptakan krisis legitimasi kebijakan.

Kebijakan publik tidak hanya dinilai dari legalitas administratif, tetapi juga dari etika dan dampaknya terhadap masyarakat. Menurut Kaelan (2016), Sila Ke-4 mengandung empat prinsip etika politik: kedaulatan rakyat, musyawarah, hikmat kebijaksanaan, dan representasi. Ketika salah satu unsur tersebut diabaikan, konflik sosial sangat mungkin terjadi. Demikian pula teori Demokrasi Deliberatif Habermas menegaskan bahwa kebijakan hanya memiliki legitimasi moral jika lahir dari dialog rasional antara pemerintah dan masyarakat yang berdampak.

Penyuluhan etika kebijakan publik berbasis Pancasila menjadi penting untuk dilakukan kepada mahasiswa, terutama agar mereka memperoleh pemahaman praktis mengenai relevansi Pancasila dalam sistem demokrasi modern. Melalui studi kasus nyata, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep normatif, tetapi juga menganalisis bagaimana pelanggaran etika Sila Ke-4 dalam proses perumusan kebijakan dapat memicu krisis sosial dan hilangnya kepercayaan publik.

Permasalahan utama mitra dalam konteks pengabdian ini adalah rendahnya literasi etika kebijakan publik pada mahasiswa sehingga menyebabkan pemahaman Pancasila bersifat teoritis dan kurang aplikatif. Penyelesaian dirancang melalui edukasi berbasis studi kasus, yaitu konflik kenaikan PBB, yang menggambarkan secara langsung pelanggaran nilai Sila Ke-4.

Solusi yang diberikan pada mitra meliputi:

- a) Edukasi konsep etika kebijakan publik yang berlandaskan Pancasila.
- b) Diskusi analitis untuk mengidentifikasi pelanggaran nilai permusyawaratan, kebijaksanaan, dan representasi dalam kasus PBB.
- c) Penyusunan rekomendasi bersama sebagai praktik penyesuaian kebijakan publik dengan nilai etika Pancasila.

2. Metodologi

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada 26 November 2025 dengan melibatkan enam mahasiswa semester satu sebagai peserta. Metode pelaksanaan menggabungkan pendekatan ceramah interaktif, diskusi kasus, dan simulasi musyawarah. Tahapan kegiatan terdiri atas:

- a) Penyampaian materi teoritis mengenai kebijakan publik, etika Pancasila, dan demokrasi deliberatif.
- b) Analisis kasus konflik kenaikan PBB berdasarkan kajian teori.
- c) Pembagian peran antara kelompok pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk simulasi musyawarah.
- d) Penyusunan rekomendasi penyelesaian konflik melalui kesepakatan berbasis dialog.

Evaluasi dilakukan melalui observasi keterlibatan peserta, partisipasi dalam diskusi, dan kemampuan peserta menyusun simpulan analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan mengenai penerapan nilai Sila Ke-4 Pancasila dalam penyelesaian konflik kebijakan publik dilaksanakan dengan melibatkan enam mahasiswa semester satu. Penyuluhan menggunakan pendekatan berbasis studi kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati guna menguatkan pemahaman peserta mengenai etika demokrasi Pancasila dalam kewenangan pemerintahan daerah. Hasil kegiatan menunjukkan

adanya peningkatan pengetahuan dan kepekaan etis mahasiswa terhadap hubungan antara nilai Pancasila dan proses kebijakan publik.

Selama sesi diskusi kasus, peserta mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, yaitu kurangnya transparansi dalam kebijakan, tidak adanya musyawarah publik, dan melemahnya fungsi representasi DPRD. Temuan ini selaras dengan teori Demokrasi Deliberatif Habermas yang menegaskan bahwa kebijakan publik hanya memperoleh legitimasi moral apabila dihasilkan melalui dialog rasional dengan masyarakat terdampak. Selain itu, mahasiswa juga menyimpulkan bahwa pelanggaran musyawarah sebagai prinsip Sila Ke-4 menyebabkan hilangnya kepercayaan publik dan meningkatnya eskalasi protes sosial.

Simulasi musyawarah tripartit antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi bagian penting dari kegiatan. Dalam proses ini, peserta menunjukkan kemampuan untuk menyusun argumen berdasarkan perspektif masing-masing aktor kebijakan. Ketika berdialog dalam simulasi, peserta mampu mengidentifikasi bahwa solusi kebijakan yang etis tidak hanya bergantung pada aspek legalitas administratif, tetapi juga pada pertimbangan moral, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan prinsip kebijaksanaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kasus efektif dalam

Berdasarkan hasil penyuluhan, peserta menyusun rekomendasi penyelesaian konflik berupa forum musyawarah publik terpadu, keterbukaan informasi mengenai dasar perhitungan tarif PBB, evaluasi kemampuan ekonomi masyarakat sebelum penetapan kebijakan, serta optimalisasi peran DPRD sebagai representasi rakyat. Rekomendasi tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa bukan hanya memahami persoalan, tetapi juga mampu menawarkan solusi berbasis nilai demokrasi Pancasila yang berorientasi pada keadilan sosial dan kolaborasi antarlembaga.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan untuk meningkatkan literasi etika kebijakan publik pada mahasiswa serta menumbuhkan karakter kritis terhadap kebijakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Temuan ini menegaskan bahwa penyuluhan berbasis studi kasus dan simulasi deliberatif merupakan metode yang efektif dalam menginternalisasi nilai Pancasila secara kontekstual, membentuk kesadaran moral, serta memperkuat kapasitas mahasiswa sebagai agen demokrasi dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Kenaikan PBB di Kabupaten Pati mencerminkan lemahnya penerapan etika Sila Ke-4 Pancasila, khususnya prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan representasi rakyat. Konflik yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tidak berlandaskan nilai demokrasi Pancasila berpotensi memicu penolakan publik dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan mendorong peran mahasiswa sebagai agen moral demokrasi. Internalisasi nilai musyawarah dan representasi diharapkan menjadi bekal mahasiswa dalam menghadapi dinamika kehidupan bernegara.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A. (2015). *Civic Culture*. Princeton University Press.
- Azhar, M. (1995). *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsur*. Universitas Indonesia.
- Coser, L. A. (1972). *The function of social conflict*. Routledge & Kegan Paul.
- Denhardt, J. V. (1979). *The new public service : serving not steering*. University Chicago Press.
- Easton, D. (1980). *A framework for political analysis*. University Chicago Press.
- Habermas, J., & McCarthy, T. (1984). *The theory of communicative action*. Beacon Press.

- Kaelan. (2016). Filsafat Pancasila. Paradigma.
Notonagoro. (1975). Pancasila secara ilmiah populer. Pantjuran tujuh.
Smith, A. (1976). The wealth of nations. Strathan & Cadell.